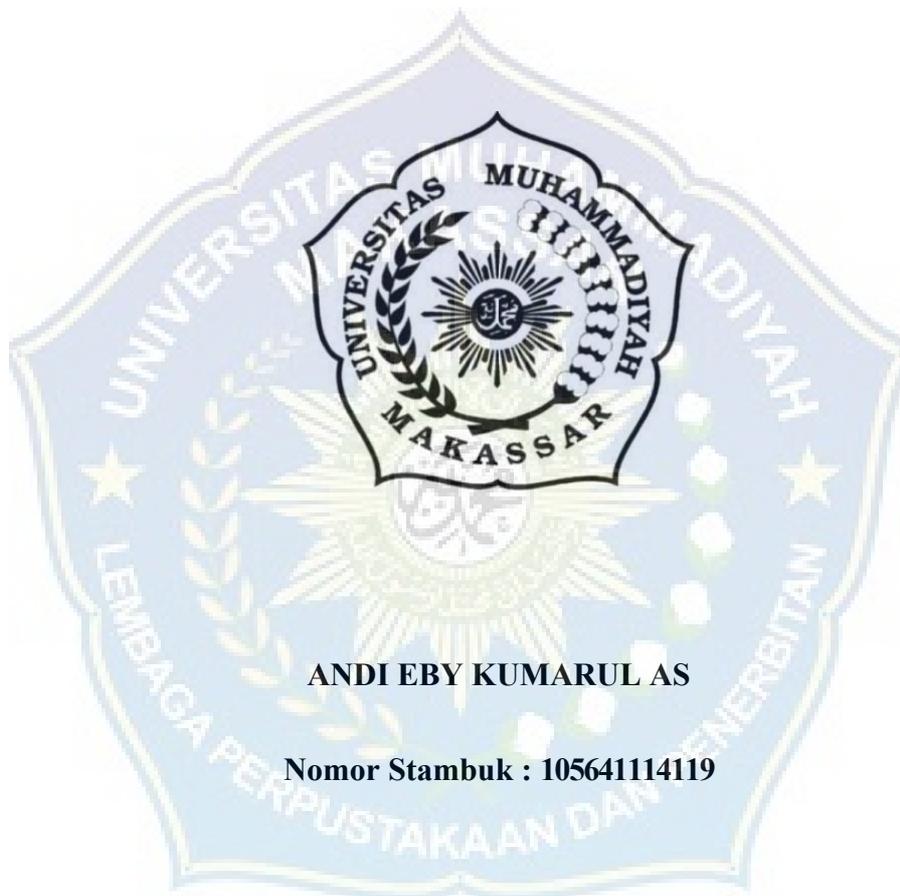


SKRIPSI

POLITIK KEPARIWISATAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER

PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA DI

KABUPATEN BULUKUMBA



ANDI EBY KUMARUL AS

Nomor Stambuk : 105641114119

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**POLITIK KEPARIWISATAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER
PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA DI
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh

Andi Eby Kumarul AS

Nomor Stambuk :105641114119

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Politik Kepariwisata Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba.

Nama Mahasiswa : Andi Eby Kumarul AS

Nomor Induk Mahasiswa : 105641114119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Pembimbing II

Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727

Ketua Program Studi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1707163

PENERIMAAN TIM

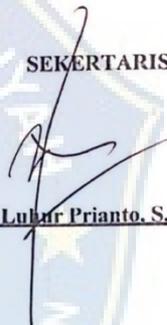
Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin 29 Agustus tahun 2023.

TIM PENILAI

KETUA

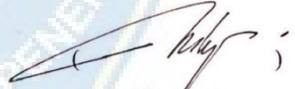
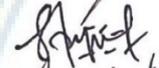
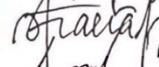
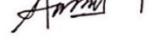
SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Ardi Lular Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP
4. Muh Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

)
)
)
)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Eby Kumarul AS

Nomor Stambuk : 105641141119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 21 Februari 2023

Yang menyatakan

Andi Eby Kumarul AS

ABSTRAK

Andi Eby Kumarul AS, Politik Kepariwisata Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba (Dibimbing oleh Ahmad Taufik, S.IP., M.AP dan Hamrun, S.IP., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana politik kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Britton 1991 yaitu Internasionalisasi modal, Restrukturisasi regional dan nasional, Pembangunan kota dan Pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Internasionalisasi Modal diperoleh hasil bahwa internasionalisasi modal belum diterapkan di sektor pariwisata kabupaten bulukumba; 2. Restrukturisasi Regional dan Nasional diperoleh hasil bahwa Kabupaten Bulukumba mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan tatanan pariwisata; 3. Pembangunan Kota diperoleh hasil bahwa pemerintah kabupaten Bulukumba telah melakukan Pembangunan dan penataan Kawasan yang memiliki potensi menjadi tempat wisata baru; 4. Pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil bahwa Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam menopang pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan melakukan pembinaan ekonomi kreatif.

Kata kunci : Politik, Kepariwisataan dan Sumber Pendapatan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia kesehatan dan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh dalam beragama. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Kepariwisata Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dan adik tersayang dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan Doa, semangat, dukungan, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga.

2. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Beserta Jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau asistennya, seluruh Staff Pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada seluruh informan/narasumber yang berperan penting dalam penelitian ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Ilmu Pemerintahan Kelas D yang telah memberikan banyak pengalaman berharga selama belajar dan berproses di kampus tercinta Unismuh Makassar.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain Insha Allah. Semoga kita mendapat lindungan dan berkah dan karunia dari Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta saudara(i) atas segala bantuannya kepada penulis, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Sistem.....	9
C. Pengelolaan Dana Desa.....	11
D. Pengertian E-Government.....	22
E. Aplikasi SISKEUDES.....	24
F. Kerangka Pikir	25
G. Fokus Penelitian	27
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	29

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata ialah salah satu sektor penyumbang devisa paling tinggi di Indonesia, dimana pemerintah Indonesia saat ini begitu gencar dalam meningkatkan kualitas sektor pariwisata di era modern serta teknologi yang semakin maju. Tetapi meningkatkan kualitas objek wisata dalam bidang pariwisata serta memperkenalkan budaya dan pesona Indonesia ke segala penjuru Negara menjadi *value added* bagi daerah maupun Indonesia untuk peningkatan kualitas ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Indonesia di setiap daerah yang ikut serta mendorong Indonesia untuk bersaing di mancanegara. Salah satu daerah dengan keunggulan sektor pariwisatanya dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam salah satunya berada di Kabupaten Sumbawa (Arisandi, 2022).

Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika kapitalis mengalami perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga mengalami perubahan bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Pariwisata adalah bagian dari globalisasi ekonomi internasional, mandiri dan berjaringan luas dengan ketergantungan yang semakin berkurang terhadap negara sebagai satuan organisasi ekonomi internasional. Dengan adanya perubahan ekonomi yang sangat dramatis itu berpengaruh pada budaya yang mengarah pada perpecahan

(fragmentasi), citra, bentuk pertunjukan, kekuasaan pasar dan pandangan wisatawan berpengaruh besar terhadap pengalaman wisatawan dalam berwisata (Putu & Prasiasa, 2022).

Peran kepariwisataan dalam memajukan perekonomian Indonesia hingga saat ini menjadi semakin besar karena sektor kepariwisataan mampu menyumbangkan devisa negara dalam jumlah yang besar. Seiring dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, sektor ini telah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia setelah migas. Sektor pariwisata di samping sektor pertanian dalam arti luas maupun sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, selalu dijadikan prioritas dalam pembangunan sektoral di daerah Bali. Berbagai aset dan potensi kepariwisataan yang menarik bagi wisatawan dapat dijumpai dan dinikmati wisatawan di Bali (Dwijendra, 2018).

(Mustapa, 2019) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun level provinsi bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sektor ini. Karena kegiatan pariwisata utama terjadi di tingkat lokal, maka pemerintah daerah hendaknya memiliki strategi antisipasi bagi dampak sosio-ekonomi maupun bio-fisik dari sektor ini. Salah satu problem dalam pesatnya perkembangan industri pariwisata ialah munculnya berbagai dampak yang tidak diinginkan pada sejumlah destinasi wisata seperti lingkungan dan masyarakat, di mana jika tidak diantisipasi, dapat mengancam baik kelayakan ekonomi masyarakat tuan

rumah, negara, maupun pembangunan pariwisata itu sendiri (Huybers & Bennet, 2003). Kurang matangnya strategi perencanaan dapat mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan pengembangan pariwisata (Jamieson & Noble, 2000). Ketidakberhasilan pembangunan pariwisata di sejumlah daerah telah melahirkan kesadaran kritis untuk memikirkan ulang secara radikal terhadap konsep pembangunan tradisional terutama dalam hal tujuan dan metode yang ingin dicapai (Harris, 2000).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh negara-negara didunia dalam rangka mendorong perekonomian nasional (Bahiyah & Hidayat, 2018) Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar karena indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas, yang wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua. Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari para ahli dan perencana pembangunan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk juga perusahaan obyek serta daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada pasal 3; Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan pasal 4; Kepariwisata bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan

kesejahteraan rakyat; c. Menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa. Dengan demikian fungsi pengembangan pariwisata ditekankan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadiyat, 2019).

Perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya berada di Kabupaten Bulukumba. Bulukumba menjadi salah satu daerah yang paling diminati para wisatawan lokal hingga mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dengan sebutan "*Butta Panrita Lopi*" dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang cukup beragam (Mustapa, 2019).

Kabupaten Bulukumba memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki beragam suku, budaya dan objek wisata lainnya, sehingga menarik untuk dikunjungi dunia nasional maupun internasional. Salah satu objek wisata yang paling menawan adalah kawasan wisata Tanjung Bira yang menawarkan pantai berpasir putih dengan panorama pesisir yang menakjubkan. Secara geografis pantai ini tepatnya terletak di ujung selatan provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan jarak tempuh 41 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar.

Pemerintah dalam hal ini para stakeholders kepariwisataan yang menyadari besarnya potensi kepariwisataan di daerah berusaha menggali, mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata. Keputusan ini harus ditindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta membenahi potensi obyek dan daya tarik wisata (Susilawati et al., 2016).

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba. Hadirnya dinas pariwisata merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata di daerah. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja yang 6 merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Fungsi Dinas Pariwisata ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, penyelenggara Pariwisata, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata.

Menjulang ke langit dan tampak kokoh perkasa, Batu Tongkarayya, wisata tebing dan pantai batu di Bulukumba ini selalu menggaungkan sensasi rasa. Di bawahnya mengalir sekumpulan air laut, kadang bergolak dan kadang diam tenang. Sesekali datang ombak menciumi kaki tebing batu dengan malu-malu. Wisata baru di Bulukumba ini terletak di Desa Lembanna, sebuah desa wisata

yang seolah tak pernah sepi oleh kunjungan wisatawan. Desa Lembanna terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Desa yang luasnya membentang 1200 Ha ini berbatasan dengan Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro di sebelah utara. Desa Lembanna dahulu menyatu atau bagian dusun dari desa Ara.

Dengan adanya pemekaran desa akhirnya Desa Lembanna berdiri sendiri terpisah dari Desa Ara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ara. Pada sebelah timur ada Laut Flores. Sedangkan bagian barat bersebelahan dengan Kelurahan Sapolohe. Spot lain yang tak kalah menariknya adalah Pantai Mandala Ria yang menawan dengan pesona airnya yang jernih serta hamparan pasirnya yang putih lembut. Belum lagi tebing Mattoanging di mana pengunjung dapat menikmati hamparan laut teluk Bone dan Tanjung Bira. Satu lagi spot istimewa yang merupakan wisata sejarah purbakala yakni *Gua Passea*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan, adapun penelitian ini berjudul “**Politik Kepariwisataaan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah, “Bagaimanakah politik kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba”.

C. Tujuan Penulisan

Mengetahui bagaimana politik kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang penulis dapat selama proses perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau ilmu kepada para pembaca.

3. Manfaat Akademis

Dapat menjadi pegangan dan panduan saat melakukan penelitian serta dapat dijadikan sebagai tinjau pustaka atau peneliti terdahulu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan berbagai perbandingan dan bahan referensi. Selain itu menghindari adanya asumsi adanya kesamaan dengan penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama penelitian	judul	Hasil penelitian
1.	Bahrudin, Nike Mutiara Fauziah (<i>Governance</i> , 2022)	Politik Pariwisata: Analisis Peran Aktor Hexa Helix dalam Inovasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Banyumas	Aktor Hexa Helix di Sektor Pariwisata yang terdiri dari Pemerintah, Swasta, Media, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs)/ <i>Interest Group</i> lainnya, dan Masyarakat Terdampak memainkan peran penting dalam inovasi kebijakan pariwisata. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata adalah Kab.Banyumas. Berbagai aktor ini tentu mempengaruhi inovasi

			<p>kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dari masing-masing aktor Hexa Helix dalam inovasi kebijakan pariwisata di Kab.Banyumas. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, analisis dokumen dan FGD. Penelitian ini menemukan bahwa peran dari masing-masing aktor dalam inovasi kebijakan pada realitasnya di Kabupaten Banyumas, masih didominasi oleh peran dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Dinas</p>
--	--	--	--

			<p>Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagai leading sector kebijakan pariwisata sementara aktor lainnya belum memiliki area yang signifikan untuk berperan dalam inovasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyumas.</p>
2.	(Zuniandi Robby, 2021)	<p>Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan dan mengetahui kebijakan alokasi anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis</p>

			<p>penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas pariwisata dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kab. Aceh Selatan sangat minim. Pemerintah hanya dapat mengalokasikan dana dalam jumlah terbatas untuk pengembangan kawasan wisata tertentu saja. Dalam 5 tahun terakhir, masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Disamping itu,</p>
--	--	--	---

			<p>adanya beberapa hambatan dalam kebijakan pengembangan sektor pariwisata antara lain: interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, aspek manajemen pembangunan sarana-prasarana, anggaran, aspek manajemen pemasaran dan promosi dan aspek SDM</p>
3.	<p>Mebri, Fredrick Hendrick Suradinata, Ermaya Jayapura (Mebri et al., 2022)</p>	<p>Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua</p>	<p>Salah satu sektor yang dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Namun sektor pariwisata di Kota Jayapura belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Penulis berfokus pada permasalahan banyaknya aset wisata di</p>

			<p>Kota Jayapura yang masih dikuasai oleh pemilik hak ulayat dengan melakukan pungutan liar, kurangnya hubungan kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam membangun dan mengembangkan objek wisata, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan tentang keadaan di lapangan yang kemudian diteliti untuk menemukan pemecahan masalah yang bersifat umum. Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data yang terkait</p>
--	--	--	---

			<p>dengan analisis ASOCA terhadap strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta implikasinya dalam menentukan strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura Provinsi Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu sejauh mana strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura seiring dengan fenomena yang menggambarkan hambatan yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi hambatan</p>
--	--	--	--

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang di paparkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini pada :

1. Dari perbedaan diatas yaitu dimana penelitian terdahulu membahas tentang Politik Pariwisata: Analisis Peran Aktor Hexa Helix dalam Inovasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Banyumas sedangkan peneliti membahas tentang politik pariwisata terhadap perkembangan sedangkan persamaanya sama-sama membahas tentang politik pariwisata
2. Adapun judul penelitian yaitu membahas tentang Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan sedangkan penelitian membahas tentang politik pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah sama-sama membahas tentang politik pariwisata dalam meningkatkan pendapatan.
3. Dari perbedaan di atas perbedaannya yaitu Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua sedangkan peneliti membahas tentang politik pariwisata persamannya yaitu sama-sama membahas tentang pendapatan anggaran daerah.

B. Kerangka Teori

1. Politik

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Publik pemerintahan dan negara. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

Pemerintahan. Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika kapitalis mengalami perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga mengalami perubahan bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Dengan demikian berarti bahwa memahami pariwisata tidak dapat terlepas dari pemahaman tentang kapitalis. Richter(1989) menyebutkan pariwisata massal (mass tourism) merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan industri kapitalis modern dan fenomena sosio-kultural.

Industri kapitalisme bangsa barat telah mengalami perubahan struktur yang sangat tajam sekitar tahun 1980- andengan adanya pergeseran-pergeseran dari regional, nasional dan internasional dalam kesempatan meningkatkan modal dan kesempatan kerja. Salah satu indikasi dari sisi demografi yang terkait dengan perkembangan pariwisata adalah timbulnya kawasan urbanisasi di sekitar daya tarik wisata. Kawasan urbanisasi memposisikan dirinya sebagai pusat konsumsi dalam sistem kapitalis yang terus mendunia. Penciptaan ciri khas dengan memanfaatkan modal budaya menjadi dasar untuk menciptakan atau menghidupkan kembali tonggak investasi regional dan internasional. Atas dasar penciptaan yang memiliki ciri khas tersebut, maka produk pariwisata dapat dijadikan elemen penting dalam rangka politik pariwisata. Karena politik itu tidak jauh dari kekuasaan, “siapa memperoleh apa”, “di mana”, “bagaimana” dan “mengapa”, maka sudah tepat jika pariwisata diidentikkan dengan masyarakat kapitalis.

Penelitian yang berdimensi politik pariwisata cenderung bersifat insidental dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau lingkungan sebagai fokusnya. Bahkan jika dikaitkan dengan kebijakan pariwisata, seharusnya penelitian dengan dimensi politik pariwisata lebih mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan, dan bukan apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian pariwisata hubungan antara politik dan pariwisata dapat terjadi pada level internasional, nasional, regional, lokal dan pada tingkatan perorangan.

Tiap-tiap tingkatan tersebut akan menggambarkan kedinamisan struktur dan kedinamisan analisis dari penelitian tersebut. Jika dalam analisis tersebut dimasukkan sistem kapitalisme yang tengah berlangsung, maka penelitian pariwisata akan dapat menggambarkan makna sosial dan materialitas ruang dan tempat yang diciptakan pada praktik pariwisata itu sendiri. Penggambaran tersebut menurut Britton (1991:478) dapat dimasukkan dalam “proses akumulasi”. Jika dikaitkan dengan fenomena pariwisata khususnya waktu senggang (*leisure time*), maka fenomena tersebut terkait dengan perjuangan untuk mengontrol waktu dan ruang yang melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, suatu upaya dari kelompok dominan untuk mencari legitimasi melalui Undang-Undang Kepariwisata yang ada, sedangkan pada sisi lain ada kelompok-kelompok yang menolak Undang-Undang Kepariwisata tersebut dengan berbagai alasannya.

2. Kepariwisata

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan (*growth*) dengan mengandalkan modal dari kaum kapitalis dan apalagi menempatkan pariwisata dalam konteks kapitalisme akan banyak berhadapan pada apa yang dinamakan dominasi, yang dalam hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat tempat pariwisata itu dikembangkan atau juga pada daerah tempat pengembangan pariwisata itu dilaksanakan.

Adapun sumber dominasi yang melanda masyarakat dan daerah tersebut dapat berasal dari dua hal yaitu pemerintah melalui kebijakan yang dihasilkan yang terkait dengan pariwisata, dan kapitalis melalui modal yang ditanamkan dengan tujuan mengeruk sebanyak mungkin sumber daya alam dan potensi sumber daya budaya yang ada di daerah itu. Akibatnya, masyarakat yang merupakan salah satu representasi dari *civil society* akan didesak oleh dua kekuatan politik yaitu negara (*state*) dengan kebijakannya dan kepentingan-kepentingan pasar (*market*) yang dibawa oleh kapitalis. Jika kondisi ini tidak diatasi, masyarakat dan pariwisata akan tergerus oleh dinamika politik yang berkembang.

Untuk mencegah kehancuran pariwisata sebagai akibat tekanan politik dari state dan market itu, maka penelitian-penelitian akademis yang berperspektif politik dari pariwisata sangat diperlukan terutama bagaimana mengatasi dominasi state dalam pembuatan kebijakan pariwisata. Selain itu Agger (2005:362-363) menyebutkan bahwa kerja

akademik yang berperspektif tertentu akan dapat menunjukkan bagaimana dominasi beroperasi dan bagaimana dominasi dapat dilawan dan diatasi dari hidup sehari-hari manusia maupun dari atas, oleh politisi dan pembuat kebijakan. Jika penyebabnya sudah diketahui, muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pariwisata merupakan elemen utama dari beberapa masalah utama di bidang ekonomi pada era politik sekarang ini. Contohnya adalah internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi (Britton, 1991). Pemahaman ekonomi secara politik kritis dengan beberapa pengecualiannya (Urry, 1990) hampir selalu terabaikan. Sebagai contoh dalam membahas politik pariwisata berkelanjutan, fokus utamanya cenderung pada masalah ekologi dan proses-proses ekonomi, sedangkan kerangka kerja politik dan budaya tidak mendapat perhatian.

Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, maka para peneliti politik pariwisata cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk menyerang masalah-masalah kebijakan. Dalam penelitian politik pariwisata juga diadopsi pendekatan dialektika, dengan titik tolaknya adalah pandangan-

pandangan yang ada pada masyarakat. Kesimpulannya adalah bukan bukti-bukti formal, melainkan saling pengertian dari masalah-masalah yang dibahas. Namun demikian, beberapa penelitian pariwisata gagal menjelaskan pariwisata sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Politik pariwisata yang bertujuan menganalisis kebijakan biasanya dimulai dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsip yang mutlak dan fakta-fakta yang kaku. Analisa kebijakan bukannya menghasilkan bukti-bukti formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan. Analisa kebijakan membantu pertimbangan-pertimbangan umum melalui kritik, nasihat.

Penelitian yang berdimensi politik pariwisata cenderung bersifat insidental dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau lingkungan sebagai fokusnya. Bahkan jika dikaitkan dengan kebijakan pariwisata, seharusnya penelitian dengan dimensi politik pariwisata lebih mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan, dan bukan apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian pariwisata hubungan antara politik dan pariwisata dapat terjadi pada level internasional, nasional, regional, lokal dan pada tingkatan perorangan. Tiap-tiap tingkatan tersebut akan menggambarkan kedinamisan struktur dan kedinamisan analisis dari penelitian tersebut (Martusa et al., 2011).

3. Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata

Pada masa otonomi daerah, daerah otonom diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika daerah otonom mampu membiayai pengeluaran daerahnya sendiri, yaitu melalui upaya penggalian potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam hal ini PAD memiliki kontribusi terhadap APBD, besarnya kontribusi PAD terhadap APBD dapat mencerminkan kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber penerimaan daerah yang sekaligus mencerminkan potensi per-ekonomian daerah (Jaenudin, Muh. Taufiq, 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah Pemerintah daerah melalui upayanya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat (Yasin, 2020).

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tahu keuangan setiap kabupaten atau kota oleh karena itu kinerja keuangan bisa ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan dari setiap kabupaten atau kota dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan pelayanan publik bisa maksimal (Yasin, 2020).

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah (Sarmila et al., 2018). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Mentari, 2022).

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah karena sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan (Cahyadi et al., 2015). Potensi pariwisata yang cukup besar pada suatu daerah masih memungkinkan bagi peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata berperan penting terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, memberikan kontribusi dalam penerimaan negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan serta melakukan kreasi dan inovasi untuk

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui retribusi objek wisata (Pleanggra & Edy Yusuf, 2012).

Salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini adalah melalui pajak dari sektor pariwisata. Seperti halnya dalam pajak yang ditetapkan oleh pemerintah di pariwisata. Pajak pariwisata merupakan pajak yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dimana berasal dari pajak hotel (termasuk wisma pariwisata, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kost), pajak restoran (rumah makan, kafe, kantin, warung, dan catering), pajak hiburan (pergelaran seni, musik, tari, pargelaran busana, pameran dan karaoke) (Mentari, 2022).

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, retribusi menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan kontribusi Retribusi Pariwisata pada Kabupaten Bulukumba diperoleh dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah atau penyewaan tanah dan bangunan, kemudian retribusi tempat khusus parkir dan terakhir retribusi tempat rekreasi, dan kabupaten bulukumba dikenal dengan wisatanya yang indah. Objek-objek wisata yang terdapat di kabupaten bulukumba ialah seperti

pantai bira, makam dato tiro, permandian hilla-hilla, puncak pus janggo, lolisang, samboang, pulau lemo-lemo, alam kahayya dan terakhir alam bravo 45 (Mentari, 2022).

Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah sendiri berkaitan dengan sektor retribusi daerah, sehingga daerah mampu menggali secara maksimal potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang berupa objek wisata. Indonesia memiliki banyak sekali potensi budaya dan alam yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Said, 2021).

Pembangunan Kepariwisata di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan (Jaenudin. Muh. Taufiq, 2019).

Salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata daerah Kabupaten Mamuju didukung Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan lingkungan, memperkuat jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air (Jaenudin. Muh. Taufiq, 2019).

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mian, 2009).

C. Kerangka Pikir

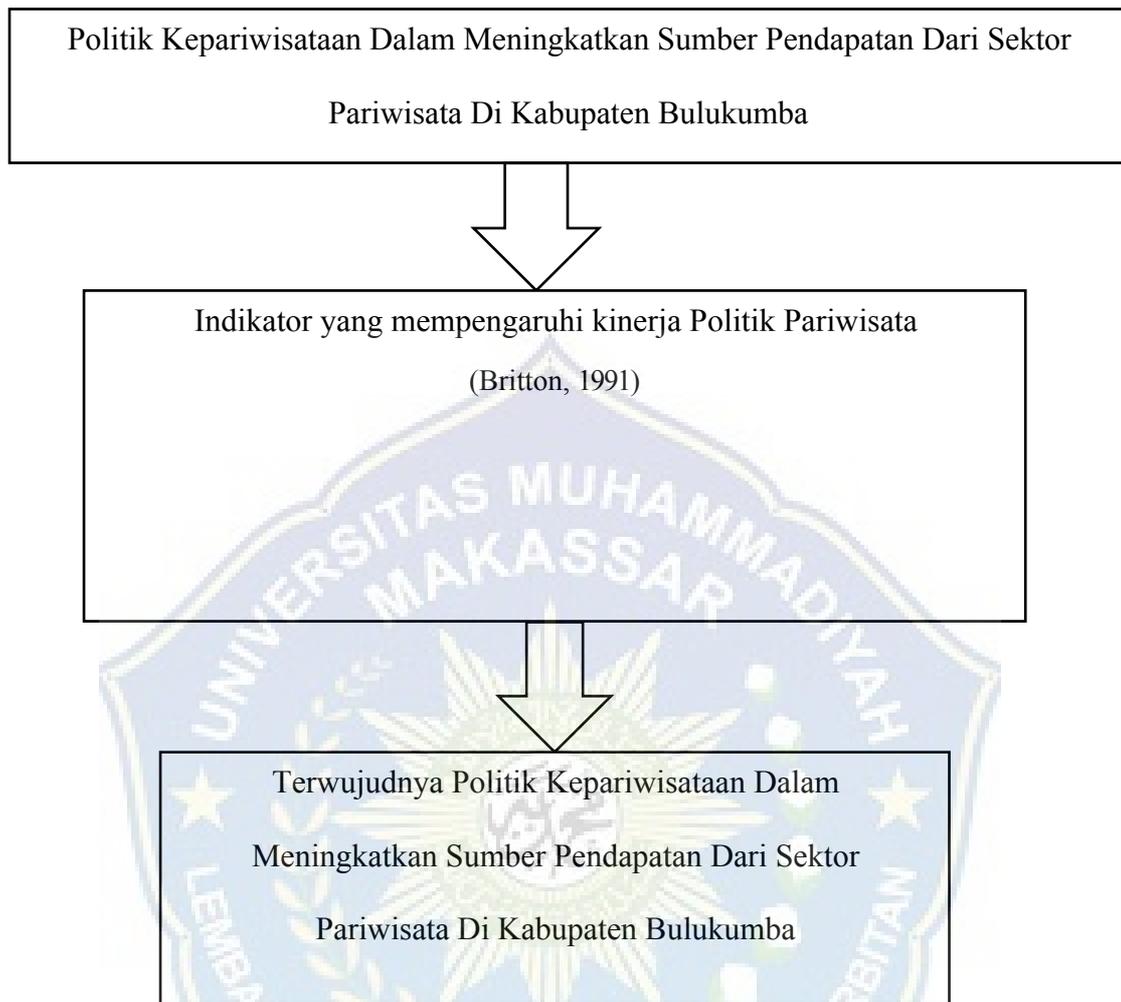
Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, maka para peneliti politik pariwisata cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk menyerang masalah-masalah kebijakan. Dalam penelitian politik pariwisata juga diadopsi pendekatan dialektika, dengan titik tolaknya adalah pandangan-pandangan yang ada pada masyarakat.

Kesimpulannya adalah, bukan bukti-bukti formal, melainkan saling pengertian dari masalah-masalah yang dibahas. Namun demikian, beberapa penelitian pariwisata gagal menjelaskan pariwisata sebagai fenomena sosial yang kompleks. Politik pariwisata yang bertujuan menganalisis kebijakan biasanya dimulai dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsip yang mutlak dan fakta-fakta yang kaku. Analisa kebijakan bukannya menghasilkan bukti-bukti formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan

Pariwisata merupakan elemen utama dari beberapa masalah utama di bidang ekonomi pada era politik sekarang ini. Contohnya adalah internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi (Britton, 1991).

Pemerintah dalam hal ini para *stakeholders* kepariwisataan yang menyadari besarnya potensi kepariwisataan di daerah berusaha menggali, mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata. Keputusan ini harus ditindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta membenahi potensi obyek dan daya tarik wisata. Kabupaten Bulukumba khususnya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan, mengingat potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Bulukumba sangat beragam meliputi obyek wisata daerah pantai, dataran rendah sampai daerah pegunungan di beberapa Kecamatan (Martusa et al., 2011).

Gambar 2.1 kerangka pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Internasionalisasi modal merupakan sebuah bisnis yang menjadi primadona di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan bisnis yang menjadi tersebut melibatkan keuangan berbagai Perusahaan-perusahaan besar lainnya. Internasionalisasi modal dalam hal ini seperti apa bentuk internasionalisasi modal yang diterapkan dalam pariwisata di kabupaten Bulukumba.
2. Restrukturisasi regional dan nasional merupakan penataan kembali agar struktur dan tatanannya menjadi baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah melakukan penataan kembali tempat wisata yang ada di kabupaten bulukumba agar struktur dan tatanannya lebih baik.
3. Pembangunan kota dalam ini merupakan proses pertumbuhan wilayah kota atau daerah pariwisata sehingga diminati oleh orang luar. Pembangunan kota dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana proses Pembangunan daerah khususnya daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang diupayakan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba agar tatanan pariwisatanya lebih baik dari segi Pembangunan.
4. Pertumbuhan ekonomi merupakan cara meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya melalui potensi sumber daya dan objek wisata serta adanya peningkatan kualitas ekonomi Masyarakat di wilayah tempat wisata yang ada di kabupaten bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan judul Politik Kepariwisataaan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba. dan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi sumber informasi dan pengambilan data yang dapat mendukung penelitian.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Politik Kepariwisataaan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba adalah:

1. Jenis penelitian

Menurut Moleong dalam (Rafika Ulfa, 2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam

lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan masyarakat yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

C. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuisisioner terhadap responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain. Data ini juga bisa

dikumpulkan untuk proyek tertentu tanpa tujuan penelitian khusus, seperti untuk keperluan sensus nasional. Peneliti memanfaatkannya untuk menjawab masalah dari penelitian baru, atau untuk mencari tahu sudut pandang alternatif pada pertanyaan asli dari riset sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok-pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dimana metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif lebih luas dari kriteria, yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian terkait Politik Kepariwisata Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba.

Tabel 3.1
Informan penelitian

No.	Informan Penelitian	Jabatan
1.	Andi Ariyono, S.IP., MM	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
2.	Wawan	Pengunjung Pantai Bira.
3.	Muhammad Azzam	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Jenis-jenis teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Teknik ini diterapkan dengan melakukan langsung pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati objek penelitian dengan mata kepala sendiri yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah catatan. Observasi dibagi menjadi tiga, pertama adalah observasi partisipatif, kedua adalah observasi langsung atau terselubung, dan ketiga adalah observasi tidak terstruktur. Ketiganya merupakan teknik observasi yang penting untuk diketahui.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompokkelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis

benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan teras bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbedabeda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20'' sampai 5°40'' Lintang Selatan dan 119°50'' sampai 120°28'' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa.

Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar.

Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba dengan slogan "Bulukumba Berlayar", masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan

kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'. Selain itu budaya keagamaan yang kental juga cukup mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba.

Sentuhan ajaran agama islam yang dibawah oleh ulama besar dari Sumatera, yang masing-masing bergelar Dato' Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu), telah menumbuhkan kesadaran religius dan menimbulkan keyakinan untuk berlaku zuhud, suci lahir bathin, selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid “appaseuwang” (Meng-Esa-kan Allah SWT).

Penduduk Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Konjo yang berdialek Makassar, yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam lingkungan keluarga dan terutama di daerah pedesaan. Kabupaten ini mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan, maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun

Bulo–bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang dan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan.



2. Profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba

Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dibidang kepariwisataan daerah di Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah” (Amdi, 2021).

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulukumba dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya. Melalui kantor Dinas pariwisata dan kebudayaan atau yang disingkat Disparbud ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Adapun tugas Disparbud adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi Disparbud ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Terkait dengan tugas dan fungsinya, Disparbud berwenang untuk mengeluarkan izin-izin bidang pariwisata meliputi Izin Usaha Pariwisata untuk travel agent dan lainnya, mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP meliputi surat Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi, Tanda daftar Usaha Kawasan Pariwisata, dan lainnya. Selain izin-izin bidang pariwisata,

Disparbud juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait bidang kebudayaan seperti kegiatan kebudayaan, alih fungsi bangunan bersejarah dan lainnya. Untuk informasi lainnya Anda dapat berkunjung

langsung pada kantor Disparbud terdekat, menghubungi kontak telepon, atau mengakses website resmi Disparbud untuk informasi umum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata :

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pariwisata mempunyai fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pariwisata ;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pariwisata;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Hasil Penelitian

1. Internasionalisasi Modal

Internasionalisasi modal merupakan sebuah bisnis yang menjadi primadona di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan bisnis tersebut

melibat keuangan berbagai Perusahaan-Perusahaan besar lainnya. Kegiatan pasar modal ini melibatkan perputaran modal yang sangat besar dari beberapa pemilik modal ke beberapa perusahaan. Oleh karenanya, keberadaan pasar modal tersebut harus dapat dipercaya oleh masyarakat. Pasar modal memiliki sebuah lembaga pengelola pasar modal (badan pengawas pasar modal/bapepam), standardisasi format pertanggungjawaban perusahaan go publik sebagai pengelola dana kepada para pemilik dana dan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat pendirian sebuah pasar modal (Martusa et al., 2011).

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham, surat utang (obligasi), reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Sementara itu, contoh pasar modal yang terbesar di dunia saat ini adalah *New York Stock Exchange*, *NASDAQ Stock Exchange*, *London Stock Exchange*, *Japan Stock Exchange*, dan *Shanghai Stock Exchange*. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi, yaitu mempertemukan issuer dengan pemodal atau investor. Selain itu juga memiliki finansial, yakni memberikan return bagi pemilik dana sesuai dana sesuai dengan instrumen yang dipilih.

“Untuk internasionalisasi pasar modal, belum diterapkan di bagian pariwisata di kabupaten Bulukumba. Hal karena pengelolaan pariwisata masih di Kelola oleh penduduk daerah asli Bulukumba. Untuk sumber dana nya juga, pariwisata di Bulukumba masih di danai oleh pemerintah”. (Wawancara dengan AA pada 04 Agustus 2023).

Dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba, belum sampai pada Internasionalisasi pasar modal. jadi pengelolaan dan pendanaan masih pegang oleh pemerintah dan pengelola serta mendapat bantuan dari pemerintah dan provinsi maupun dari kementerian.

2. Restrukturisasi Regional Dan Nasional

Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar organisasi lebih berdaya. Kata lain dari restrukturisasi adalah penataan Kembali. Dalam meningkatkan jumlah kunjungan di kabupaten bulukumba, ditingkatkannya perbaikan infrastruktur, baik dari segi akses maupun peningkatan jumlah fasilitas yang ada serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang wisata.

Hal ini diperuntukkan agar SDM yang terlibat didalamnya mampu mengelola bahkan mampu memberikan kemajuan terhadap pengembangan pariwisata sehingga mampu menarik wisatawan khususnya wisatawan luar negeri. Dalam hal ini sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan sangat penting kegiatan pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia memulai menerapkan kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian diharapkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia di Indonesia semakin meningkat khususnya dalam sektor pariwisata sehingga memenuhi standarisasi internasional.

Kabupaten Bulukumba mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk dana DAK non fisik di dapat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kependudukan, peningkatan kualitas SDM di bidang pasar digital, peningkatan kualitas SDM di bidang tata Kelola desa wisata.

“Untuk DAK non fisik mulai tahun 2019 kita dapat untuk peningkatan SDM, jadi kita buat semacam pelatihan tata Kelola destinasi, peningkatan SDM di bidang kependudukan, kemudian peningkatan SDM di bidang pasar digital, tata Kelola desa wisata, itu yang kita lakukan untuk pemanfaatan DAK non fisik. Untuk DAK diserahkan oleh kementerian secara bertahap”.

(Wawancara dengan AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Selama kurang lebih tiga tahun mendapat DAK fisik dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, namun pada tahun lalu tertahan karena ada persyaratan yang diminta oleh kementerian untuk mr plan wisata yang tidak sesuai dengan standar kementerian dan diminta untuk merevisi agar Kembali mendapat Dana Alokasi Khusus Fisik.

“Kita ada dana DAK fisik selama kurang lebih tiga tahun yang lalu dari kementerian, namun tahun lalu kita sudah tidak dapat karena ada persyaratan yang diminta oleh kementerian untuk mr plan wisata yang tidak sesuai dengan standar kementerian, jadi kita revisi dulu agar Kembali mendapat dana DAK fisik”

(Wawancara dengan AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Alokasi Khusus Non fisik ini diatur dalam Perbup Kabupaten Bulukumba nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 yaitu Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terjadi penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata terjadi penyesuaian rincian belanja berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik dana pelayanan kepariwisataan.

3. Pembangunan Kota

Tujuan dari Pembangunan kota adalah untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal sekaligus tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkualitas. Menciptakan kondisi dimana setiap orang merasa aman dan nyaman untuk tinggal dan hidup di area perkotaan. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki beberapa potensi pariwisata.

Seperti yang diketahui bahwa Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah. Baru-baru

ini, pemerintah membangun sebuah tempat wisata baru sebagai wujud Pembangunan kabupaten Bulukumba dari sektor pariwisata.

“Sekarang pak bupati membangun Pantai merpati, Pantai merpati mulai di bangun tahun ini (2023) di PU dan Tata Ruang itu untuk pengembangan pariwisata di kabupaten bulukumba. kemudian ada bantuan dari provinsi untuk kuliner, yaitu kuliner peti kemas yang ada di Pantai merpati. itu ada bantuan dari Dinas Perindustrian Provinsi”
(Wawancara dengan bapak AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AA yang mengatakan bahwa untuk Pembangunan kota dalam bidang pariwisata, pemerintah Kabupaten Bulukumba membangun Pantai Merpati yang mulai di garap pada tahun 2023. Pembangunan Kawasan Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba akan menjadi ikon baru Kabupaten Bulukumba. Pantai Merpati ditarget akan menjadi Kawasan Wisata, Pusat Kuliner dan Ruang Publik yang diharapkan rampung pada tahun 2024 mendatang.

Pembangunan Kawasan Pantai merpati merupakan ide dari pemerintah kabupaten Bulukumba sebagai Kawasan wisata baru yang ada di Kabupaten Bulukumba. Pembangunan Kawasan wisata Pantai merpati ini guna untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Penataan Kawasan pantainya-pun dibuat agar multifungsi yaitu sebagai taman, sarana olahraga dan Kawasan kuliner. kawsan Pantai merpati inipun menjadi wadah bagi para pelaku UMKM dan Masyarakat pesisir untuk berkegiatan.

Gambar 4.2 Kawasan Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber : Bulukumbakab.go.id



“Tatanan untuk destinasi wisata, kementerian lagi gencar-gencarnya membuat pengembangan desa wisata, kita sudah 2 tahun ikut dan ada yang lolos untuk desa wisata itu. yang pertama di 2021 untuk desa wisata alam, kemudian tahun 2022 kita hanya sampai di 300 besar desa wisata andalan. nanti di tahun ini (2023) baru masuk di 75 besar untuk pengembangan desa wisata. sementara masih proses, kita tunggu malam puncak anugrah desa wisata itu di agustus ini”.

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata. Kabupaten

Bulukumba telah dua tahun mengembangkan desa wisata dan pada tahun 2021 lolos untuk desa wisata alam. Kemudian pada tahun 2022 sampai pada 300 besar desa wisata andalan. pada tahun 2023 masuk dalam 300 besar untuk pengembangan desa wisata.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam Masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Yasin, 2020).

Manfaat pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan per kapita masyarakat yang dapat meningkatkan Pinjaman pemerintah yang lebih kecil Adanya peningkatan pelayanan publik, Investasi meningkat Sebagai evaluasi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

“Ada pembinaan ekonomi kreatif. jadi ada pelatihan pemasaran digital, ada inovasi dan intentitas kuliner. kemudian kita juga melakukan pendampingan terkait dengan konvensasi harga kenaikan bbm untuk pelaku usaha ekonomi kreatif. jadi kita memberikan voucher bbm itu untuk tiga bulan (selama covid) yang diambil langsung di spbu. jadi ini adalah bantuan sosial untuk ekonomi kreatif”.

(Wawancara dengan bapak AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan Bersama dengan AA dapat disimpulkan bahwa Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam

menopang pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan melakukan pembinaan ekonomi kreatif dengan melakukan pelatihan pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital dilakukan menggunakan media sosial. Dengan begitu, ada inovasi. Pembinaan ekonomi kreatif di kabupaten bulukumba merangkul para pelaku usaha dengan melakukan pelatihan dan pendampingan terkait dengan ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten bulukumba.

“Ada perbup tentang penarikan retribusi secara elektronik, di tanjung bira, kemudian ada asuransi yang bekerjasama dengan jasa raharja untuk wisatawan yang sudah di amahkan dalam undang-undang no 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan jadi itu harus di implementasikan di lapangan. kemudian ada Kerjasama dengan bank BNI dan Mandiri, bisa membayar secara digital dengan cara scan barcode”.

(Wawancara dengan AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Di tempat wisata tanjung bira telah menerapkan penarikan retribusi secara elektronik dengan cara *scan barcode*. Sebagai bentuk Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), pihak dari Bank BNI telah menyediakan layanan kartu *Tapcash* yang dapat digubakan pengunjung untuk membayar retribusi pada pintu masuk Kawasan Pantai bira. Pengunjung membayar retribusi sekitar 15 ribu perkepala. *TapCash* merupakan Uang Elektronik pengganti Uang Tunai yang dapat diisi ulang, dapat digunakan untuk pembayaran pada merchant-merchant kerjasama BNI. Layanan ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan

transparansi publik melalui sistem elektronik, serta memudahkan dalam efisiensi pengelolaan sistem.

Gambar 4.3 Kawasan Wisata Tanjung Bira



Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba melakukan terobosan dengan memberikan asuransi kepada para pengunjung kawasan Wisata Bira.

Dinas Pariwisata menggandeng PT Jasa Raharja Putera melalui perjanjian kerjasama dilakukan Kepala Dinas Pariwisata dengan Kacab PT JasaRaharja Putera Cabang Makassar. Pemerintah bekerjasama dengan asuransi Jasa Raharja untuk wisatawan yang sudah di amanahkan dalam undang-undang no. 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan

keselamatan kepada pengunjung yang harus di implementasikan di lapangan.

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Asuransi bisa memberikan proteksi pada hal-hal yang tidak diinginkan. seperti kehilangan ataupun kerusakan akibat berbagai hal. Asuransi sangat penting saat berwisata baik di dalam maupun luar negeri, asuransi perjalanan bisa melindungi diri dan keluarga dari situasi yang tidak

terduga. Misalnya saja, ketika mengalami keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, ataupun saat berhadapan dengan situasi darurat medis.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten bulukumba memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan cara memfasilitasi produk lokal asli Bulukumba untuk tembus atau terpajang di pasar ritel modern dan terintegrasi dengan aplikasi Ojek Pinisi dalam melakukan promosi dan pemasaran secara digital. Hal ini adalah Upaya untuk memajukan dan mensejahterahkan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bulukumba secara konsisten dan *Sustainable* (Berkelanjutan). Adanya Kerjasama antara pemerintah dan peritel modern ini juga menjadi wadah promosi produk buatan asli dari daerah bulukumba kepada wisatawan yang berkunjung.

“Menurut saya hal yang menarik di Tanjung bira ini adalah pantainya yang bersih dan pengelolaannya yang tertata. kemudian hal menarik lainnya adalah di Tanjung Bira ini tidak hanya Pantai Tanjung bira, tetapi ada juga Pantai Bara, Pantai Panrang Luhu, Pantai Kaluku, Pantai Kasuso, Pantai Mandala Ria, Pantai Marumasa dan Wisata Phinisi di Tanah Beru”.

(Wawancara dengan W pada tanggal 04 Agustus 2023).

“Potensi pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba ini sangat banyak dan apabila terus dikembangkan akan berdampak baik bagi keberlangsungan pariwisata di Bulukumba. Hal itu juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah dan perekonomian Masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru khususnya yang tinggal di daerah sekitaran tempat wisata”.

(Wawancara dengan MA pada tanggal 23 Agustus 2023).

Gambar 4.4 Kawasan Wisata Pantai Bira



Dari hasil wawancara dengan W dan MA menyatakan bahwa potensi pariwisata di kabupaten bulukumba sangat bagus. Jika pengelolaannya bagus dan tertata, maka hal tersebut akan menarik lebih banyak pengunjung. Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan faktor lain yang berpengaruh terhadap pariwisata, yaitu nilai tukar dan inflasi. Hal ini berarti bahwa peningkatan penerimaan pariwisata meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak lain dari dikembangkannya pariwisata adalah meningkatnya pendapatan Masyarakat, peluang kerja yang semakin banyak, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan dan Pembangunan pemerintah terkhusus di kabupaten Bulukumba.

Pembangunan pariwisata di suatu daerah tentu erat kaitannya dengan peran pemerintah, sektor pariwisata tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemerintah seperti perbaikan akses, memperluas berbagai bentuk fasilitas, adanya koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan mencari wisatawan dan juga melakukan promosi. Hal ini tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam hal tersedianya lapangan pekerjaan yang baru, meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata, serta terjalinnya kebersamaan antara Masyarakat lokal wisatawan.

C. Pembahasan

1. Internasionalisasi Modal

Sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen pasar modal lainnya. Internasionalisasi modal merupakan sebuah bisnis yang menjadi primadona di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan bisnis tersebut melibat keuangan berbagai Perusahaan-Perusahaan besar lainnya. Dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba, Dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba, belum sampai pada Internasionalisasi pasar modal. jadi pengelolaan dan pendanaan masih dipegang oleh

pemerintah dan pengelola serta mendapat bantuan dari pemerintah dan provinsi maupun dari kementerian.

2. Restrukturisasi Regional dan Nasional

Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar organisasi lebih berdaya. Restrukturisasi regional dan nasional merupakan penataan kembali agar struktur dan tatanannya menjadi baik dimulai dengan peningkatan kualitas SDM.

Secara makro, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan Pembangunan pariwisata yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan secara mikro, kualitas SDM perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal, seperti perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja.

Kabupaten Bulukumba mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk dana DAK non fisik di dapat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kependudukan, peningkatan kualitas SDM di bidang pasaran digital, peningkatan kualitas SDM di bidang tata Kelola desa wisata.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non fisik ini diatur dalam Perbup Kabupaten Bulukumba nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 yaitu Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terjadi penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK) dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata terjadi penyesuaian rincian belanja berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik dana pelayanan kepariwisataan.

3. Pembangunan Kota

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal sekaligus tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkualitas.

Kabupaten Bulukumba telah dua tahun mengembangkan desa wisata dan pada tahun 2021 lolos untuk desa wisata alam. kemudian pada tahun 2022 sampai pada 300 besar desa wisata andalan. pada tahun 2023 masuk

dalam 300 besar untuk pengembangan desa wisata. seperti yang diketahui bahwa Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Sesuai dengan prinsip utama dalam desa wisata, yaitu desa membangun.

Pembangunan Kawasan Pantai merpati merupakan ide dari pemerintah kabupaten Bulukumba sebagai Kawasan wisata baru yang ada di Kabupaten Bulukumba. Pembangunan Kawasan wisata Pantai merpati ini guna untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Penataan Kawasan pantainya-pun dibuat agar multifungsi yaitu sebagai taman, sarana olahraga dan Kawasan kuliner. kawasan Pantai merpati inipun menjadi wadah bagi para pelaku UMKM dan Masyarakat pesisir untuk berkegiatan.

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi selama ini sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah fasilitas-fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur meningkatkan pelayanan kualitas masyarakat kepada daya tarik bagi semua investor (Yasin, 2020).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam menopang pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan melakukan pembinaan ekonomi kreatif dengan melakukan pelatihan pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital dengan begitu, ada inovasi dari pemasaran dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi.

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Contoh dari ekonomi kreatif adalah kerajinan, kuliner, fashion, film, periklanan, seni pertunjukkan, dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan dan memperkuat identitas budaya mereka. Karya seni, musik, desain, dan produk kreatif lainnya dapat mencerminkan kekayaan budaya suatu masyarakat dan menghargai keragaman budaya yang ada.

Pemerintah bekerjasama dengan asuransi Jasa Raharja untuk wisatawan yang sudah di amanahkan dalam undang-undang no. 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan untuk memberikan kenyamanan, keramahan,

perlindungan keamanan dan keselamatan kepada pengunjung yang harus di implementasikan di lapangan.

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Internasionalisasi Modal diperoleh hasil bahwa internasionalisasi modal belum diterapkan di sektor pariwisata kabupaten bulukumba.
2. Restrukturasi Regional dan Nasional diperoleh hasil bahwa bentuk penataan Kembali yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan tatanan pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba.
3. Pembangunan Kota diperoleh hasil bahwa pemerintah kabupaten Bulukumba telah melakukan Pembangunan dan penataan Kawasan yang memiliki potensi menjadi tempat wisata baru.
4. Pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil bahwa Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam menopang pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan melakukan pembinaan ekonomi kreatif dan berupaya untuk memberdayakan pelaku UMKM.

B. Saran

- 1) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan adanya promosi, serta komunikasi dan pembinaan terhadap industri pariwisata, sehingga nantinya kontribusi jumlah wisatawan terhadap pendapatan sektor pariwisata lebih besar.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap retribusi sektor pariwisata sesuai dengan perda. Serta melakukan penataan objek wisata.
- 3) Pengembangan objek wisata dengan melestarikan tradisi, nilai, dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event-event daerah. Sehingga objek wisata yang ada dapat optimal menyerap wisatawan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

Amdi, N. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba*. 3(2), 6.

- Arisandi, B. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 171–182. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1183>
- Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 95–103.
- Britton, S. (1991). Tourism, capital, and place: Towards a critical geography of tourism. *Environment and Planning D: Society and Space*, 9(4), 451–478.
- Cahyadi, R., Rasuli, M., & Anggraini, L. (2015). *Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2009– 2013*. Riau University.
- Dwijendra, N. K. A. (2018). Eco Tourism Opsi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Bali Tengah. *Senada*, 1(1), 393–402.
- Governance, L. (2022). *J p a l g*. 6(2), 136–154. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i2.6570>
- Hadiyat, Y. D. (2019). Disrupsi Digital dan Pariwisata di Toraja Digital Disruption and Tourism in Toraja. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika #3 Tahun, 2019*, 168–178.
- Jaenudin. Muh. Taufiq. (2019). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 67–71.
- Martusa, R., Program, K., Akuntansi, M., & Kristen, U. (2011). *Radar Bandung Kamis, 03 November 2011*. November.
- Mebri, F. H., Suradinata, E., Jayapura, P. K., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2022). *Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Jayapura Provinsi Papua Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (Pad) in Jayapura City Papua Province*. 12(1), 102–114.
- Mentari, A. (2022). *Kontribusi Pemungutan Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba*.
- Mian, S. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. *Undang-Undang*, 2(5), 255. ???
- Mustapa, H. (2019). *Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Civil Society Political Regional Tourism in Civil Society Perspective*. 1(1), 24–50.
- Pleanggra, F., & Edy Yusuf, A. G. (2012). Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro*, 1, 1–8.
- Putu, D., & Prasiasa, O. (2022). *Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata*. 3, 55–68. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1658>

- Rafika Ulfa, M. P. (2007). *KONSEP DASAR PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN*. 2853, 39–54.
- Said, R. N. (2021). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. 1, 1–14.
- Sarmila, S., Madani, M., & Mahsyar, A. (2018). Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 359.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1058>
- Susilawati, Mappamiring, H., & Said, A. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Bira Sebagai Sumber Unggulan Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 351–366.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.
<https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Zuniandi Robby. (2021). Politik anggaran dan pengelolaan retribusi pada objek wisata di aceh selatan. *Jurnal Inovetera*, 1(1), 71.

L

A

M

P

I

R



A

N



Wawancara dengan AA pada tanggal 04 agustus 2023





Wawancara dengan W pada tanggal 04 agustus 2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1937/05/C.4-VIII/VII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Dzulhijjah 1444 H
17 July 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2012/FSP/A.1-VIII/VII/1444H/2023M tanggal 17 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI EBY KUMARUL
No. Stambuk : 10564 1114119
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"POLITIK KEPARIWISATAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA "

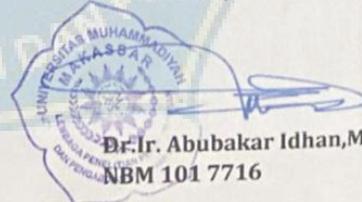
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Juli 2023 s/d 20 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 465/DPMPTSPTK/IP/VIII/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/844/Bakesbangpol/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Andi eby kumarul
Nomor Pokok : 105641114119
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang : S1
Institusi : Universitas muhammadiyah makassar
Tempat/Tanggal Lahir : BULUKUMBA / 2001-04-11
Alamat : Jln goaria, kel pai, kec biringkanaya, kota makassar

Jenis Penelitian : Kualitatif
Judul Penelitian : POLITIK KEPARIWISATAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA

Lokasi Penelitian : Bulukumba
Pendamping : Ahmad Taufik S,ip M,AP
Instansi Penelitian : Dinas pariwisata kab bulukumba
Lama Penelitian : tanggal 1 agustus 2023 s/d 1 september 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Nip : 19670304 199303 2 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 22467/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bulukumba
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 19737/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI EBY KUMARUL**
Nomor Pokok : 105641114119
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" POLITIK KEPARIWISATAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Agustus s/d 01 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Eby Kumarul AS

Nim : 105641114119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Hafid, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Andi Eby Kumarul AS, Lahir di Bulukumba pada tanggal 11 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Andi Sirajuddin dan ibu Andi Jusmani serta adik perempuan yang bernama Andi Regina Syifara. Penulis pertamakali menempuh pendidikan di TK Pertiwi pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2007. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD 10 Ela-Ela dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP 12 Bulukumba dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis Kembali melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba kemudia tamat pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2023 penulis mendapat gelar S1 pada program studi ilmu pemerintahan dengan judul skripsi “Politik Kepariwisata Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba”. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.